

Kehadiran Kerjasama Keamanan Trilateral AUKUS bagi Asia Tenggara: Memaknai Perbedaan Sikap Negara Anggota dan Relevansi ASEAN

Omegadon Rutin Maisi

Program Pascasarjana Hubungan Internasional, Universitas Indonesia

Correspondence: omegadon.rm@ui.ac.id

Abstrak. Fenomena pakta keamanan trilateral AUKUS (Australia-United Kingdom-United States Partnership) telah menimbulkan polemik dalam tubuh ASEAN. Keterlibatan Australia dalam AUKUS memberikan hak bagi Australia untuk memiliki delapan kapal selam bertenaga nuklir menuai pro-kontra negara anggota ASEAN. Vietnam dan Filipina cenderung mendukung perjanjian tersebut, sedangkan Indonesia dan Malaysia menentang keputusan Australia. ASEAN telah mendeklarasikan diri sebagai kawasan bebas nuklir pada SEANWFZ (*Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*), sehingga secara ideal tidak mendukung keputusan Australia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh perbedaan respon dari negara-negara ASEAN terhadap sentralitas ASEAN selaku regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan perspektif realisme, ditemukan bahwa perbedaan respon negara ASEAN tidak berpengaruh terhadap sentralitas ASEAN. Hal ini didasari pada dua hal, pertama, respon negara yang mendukung kebijakan Australia adalah *spontaneous response* atas situasi keamanan negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Kedua, ASEAN masih tetap relevan sebagai pijakan kebijakan luar negeri negara anggota ASEAN khususnya pada kebijakan Kawasan Bebas Nuklir. Untuk itu, ASEAN masih tetap relevan dalam konstelasi keamanan di kawasan.

Kata kunci: AUKUS; Perbedaan Respon Negara Anggota ASEAN; SEANWFZ; Sentralitas ASEAN.

Abstract. *The phenomenon of the AUKUS (Australia-United Kingdom-United States Partnership) trilateral security pact has caused a polemic within ASEAN. Australia's involvement in AUKUS gives Australia the right to have eight nuclear-powered submarines, reaping the pros and cons of ASEAN countries. Vietnam and the Philippines tend to support, while Indonesia-Malaysia oppose Australia's decision. Ideally, ASEAN, which has declared itself a nuclear-free zone in the SEANWFZ (Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone), does not support Australia's decision. This paper aims to analyze the effect of different responses from ASEAN countries to ASEAN centrality as regionalism in Southeast Asia. Based on the analysis conducted with the realism perspective, it was found that the differences in the responses of ASEAN countries did not affect the centrality of ASEAN. This is based on two things, firstly the response of countries that support Australia's policy is a spontaneous response to the security situation of countries involved in the South Tiongkok Sea conflict, the two ASEANs are still relevant as a foothold for the foreign policy of ASEAN member countries, especially on the policy of the Nuclear Free Zone. For this reason, ASEAN is still relevant in the security constellation in the region.*

Keywords : AUKUS; ASEAN Centrality; Differences in Response of ASEAN Member Countries; SEANWFZ.

PENDAHULUAN

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison secara resmi menyepakati dan meresmikan pakta pertahanan tiga negara yaitu AUKUS (*Australia-United Kingdom-United States Partnership*) pada 15 September 2021. Pakta pertahanan trilateral AUKUS merupakan hasil inisiasi ketiga negara pendiri untuk secara bersama-sama mengembangkan kapal selam bersenjata nuklir untuk Australia sekaligus mengendalikan situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik (The

Guardian, 2021). Amerika Serikat menjadi negara tradisional yang berperan penting dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia Pasifik namun kehadiran Tiongkok dengan kekuatan ekonomi dan militer menjadi titik awal dari rivalitas kedua negara di kawasan (Bendini, 2016).

Menurut Fadry (2018) bahwa peningkatan kapabilitas militer Tiongkok serta kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat menimbulkan pola interaksi konfliktual dari segi interaksi *claimant states*. Pola ini dapat merusak arsitektur kawasan Asia Pasifik dan mengancam

posisi negara-negara anggota ASEAN. Kehadiran pakta kerjasama keamanan trilateral AUKUS menjadi medium bagi Amerika Serikat untuk menghadang agresivitas Tiongkok dalam konflik Laut Cina Selatan. Selaras dengan hal tersebut, menurut Boekenstein (2021) yang menyebutkan AUKUS merupakan pakta pertahanan paling signifikan pasca berakhirnya perang dunia ke-2, keikutsertaan Australia sebagai negara mitra Amerika Serikat dan Inggris sejatinya menampilkan upaya ketiga negara untuk meredam Tiongkok.

Merujuk pada geografis kawasan Asia Pasifik, Australia berdekatan dengan negara-negara Pasifik Selatan dan Asia Tenggara, maka dari itu kebijakan pemerintah Australia dapat berpengaruh kepada negara-negara tersebut, termasuk ASEAN. Kebijakan Australia bergabung dengan pakta keamanan AUKUS menuai pro dan kontra di negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan, dengan pakta keamanan AUKUS, Angkatan Laut Australia akan memiliki kapal selam berteknologi nuklir yang memiliki keunggulan dalam kecepatan laju, *undetected*, jangka waktu kemampuan menyelam dan menembakkan misil jauh. Dari kesepuluh negara ASEAN, lima diantaranya memberikan pernyataan atas kebijakan Australia dalam Pakta Keamanan AUKUS dan terbagi dalam 2 kelompok negara yaitu mendukung dan menentang AUKUS. Kelompok negara ASEAN yang mendukung pakta keamanan AUKUS adalah Filipina, Singapura dan Vietnam. Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin dalam pernyataan resmi Pemerintah Filipina menyebutkan: *“There is an imbalance in the forces available to the ASEAN member states, with the main balancer more than half a world away. The enhancement of a near abroad ally’s ability to project power should restore and keep the balance rather than destabilize it. Despite advances in military science, time and distance, and the concomitant stopping power of water, remain major constants in determining security capacity to respond appropriately to threats”* (Departement of Foreign Affairs Republic of The Philippines, 2021).

Pernyataan sikap Filipina tersebut mendukung keterlibatan Australia adalah wujud dari upaya menyeimbangkan kekuatan militer Tiongkok di kawasan Asia Pasifik dan negara-negara ASEAN tidak memiliki kapabilitas militer yang cakap dalam menghadapi Tiongkok di Laut Cina Selatan, maka dari itu mendukung Australia sebagai negara mitra ASEAN

merupakan pilihan yang rasional. Selain itu, dukungan Filipina juga ditunjukkan dengan kesediaan Angkatan Bersenjata Filipina untuk mengikuti latihan militer gabungan *Philippine-U.S Annual Balikatan Exercise* yang digelar pada tanggal 28 Maret 2022 hingga 1 April 2022. Sikap Filipina tersebut dimaknai sebagai dukungan kepada mitra tradisional yaitu Amerika Serikat dalam menghadapi sengketa di Laut Cina Selatan dimana Tiongkok telah mengklaim hampir seluruh wilayah perairan strategis Filipina.

Sejalan dengan Filipina, Pemerintah Singapura juga menyatakan dukungan kepada Australia yang bergabung dengan pakta kerjasama keamanan AUKUS. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menyebutkan AUKUS berpotensi menjadi perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Dalam pernyataannya, Singapura menyebutkan keterlibatan Australia akan menjadi penyeimbang militer Tiongkok di kawasan (*“Australia has done its own calculation and decided it needs to tack far more closely with America at a strategic level”*) (This Weekend in Asia, 2021). Sikap Singapura yang mendukung AUKUS untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan dimaknai sebagai kehati-hatian Singapura dalam menghadapi isu Laut Cina Selatan. Melalui perspektif geopolitik, Singapura tidak terlibat secara langsung dalam Laut Cina Selatan namun sebagai negara yang mengandalkan sektor jasa dan perdagangan dalam perairan, konflik Laut Cina Selatan akan mempengaruhi laju perekonomian Singapura, maka dari itu mendukung AUKUS merupakan upaya mengembalikan stabilitas di kawasan.

Negara ASEAN terakhir yang mendukung AUKUS adalah Vietnam, melalui juru bicara kenegaraan Vietnam Le Thi Thu Hang menyebutkan: *“The nuclear energy must be developed and used for peaceful purposes and serve socio-economic development, ensuring safety for humans and the environment”* (Hanoitimes, 2021). Berdasarkan pernyataan tersebut, sejatinya Vietnam menyatakan harapan atas teknologi nuklir yang menjadi fokus utama dari kerjasama AUKUS agar dapat digunakan untuk kepentingan perdamaian dunia. Menurut Australian Strategic Policy Institute, netralitas Vietnam dimaknai sebagai *hidden support* atau dukungan terselubung atas AUKUS (ASPI, 2021). Jika merunut dari posisi Vietnam sebagai target

tindak koersif Tiongkok maka sudah sewajarnya jika Vietnam mendukung AUKUS.

Hal ini berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara pendiri ASEAN tersebut secara tegas menolak kehadiran AUKUS di Kawasan Indo-Pasifik. Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi melalui Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi atas keterlibatan Australia di AUKUS. Presiden RI Joko Widodo menyebutkan: “*ASEAN-Australia perlu terus membangun kepercayaan agar dapat berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan*” (AntaraneWS, 2021). Sebelum aliansi pakta pertahanan AUKUS disepakati, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton dan Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne pada 9 September 2021. Pada pertemuan tersebut berhasil disepakati beberapa poin kerjasama dibidang militer. Keberhasilan

mencapai kesepakatan kerjasama di bidang militer dengan Australia ini nyatanya tidak mempengaruhi sikap Indonesia atas AUKUS. Keterlibatan Amerika Serikat di AUKUS dimaknai sebagai *balance of power* dari kehadiran Tiongkok pada konflik Laut Cina Selatan. Keberadaan dua “pemain besar” di kawasan Indo-Pasifik ini dikhawatirkan membawa negara-negara yang berada di kawasan dalam pusaran konflik.

Tak hanya Indonesia, Malaysia juga menolak kehadiran aliansi pakta pertahanan AUKUS di kawasan. Penggunaan unsur nuklir dalam persenjataan yang terdapat dalam pakta AUKUS menjadi perhatian utama Malaysia. Melalui Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Kamarudin Bin Jaffar menyebutkan: “*Malaysia dan negara-negara anggota ASEAN lain komitmen menegakkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam SEANWFZ dan TAC. Ini demi memastikan keamanan, kestabilan dan keselamatan regional*”. (AntaraneWS, 2021)

Tabel 1
Perbedaan Sikap Negara Anggota ASEAN terhadap Keterlibatan Australia dalam AUKUS

Negara	Sikap Dtkungan		Catatan
	Memberi	Menolak	
Filipina	✓		AUKUS dilihat sebagai penyeimbang kekuatan Tiongkok di kawasan
Singapura	✓		AUKUS dilihat berpotensi untuk menjaga stabilitas di kawasan
Vietnam	✓		Kepemilikan nuklir oleh negara anggota AUKUS dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan kawasan
Indonesia		✓	Keterlibatan Australia di AUKUS menjadi ancaman stabilitas kawasan
Malaysia		✓	Kehadiran nuklir di kawasan hanya akan mengancam keamanan ASEAN

Sumber : data olahan

Sikap Malaysia ini didorong oleh negara-negara mitra ASEAN lainnya yang turut memiliki nuklir dalam persenjataan seperti India, Tiongkok dan Pakistan. Pakta keamanan AUKUS akan memungkinkan Australia turut memiliki persenjataan maupun alutista seperti kapal selam dengan kekuatan nuklir dan hal ini akan membuat ASEAN pada posisi yang sulit. Merujuk pada peta kawasan Asia Pasifik, terdapat tiga negara yang memiliki senjata nuklir yaitu Pakistan, India dan Tiongkok.

Menurut Fajria (2018) kepemilikan nuklir India dan Pakistan sejatinya tidak berpotensi menimbulkan gencatan senjata, hal ini mengingat hubungan bilateral keduanya yang pasang surut dan tidak ada pernyataan secara

resmi dari pemerintah maupun pemimpin keduanya untuk perang secara terbuka. Akan tetapi, potensi untuk mengembangkan senjata nuklir masing-masing negara masih terbuka, misalnya pada Maret 2022 militer India menembakkan rudal ke Pakistan walaupun hal ini diklaim sebagai kendala teknis oleh India. Selain India dan Pakistan, kepemilikan nuklir oleh Tiongkok juga mengancam kestabilan kawasan, prinsip *no-first use policy* yang dikembangkan pemerintah Tiongkok nyatanya juga tidak memberikan jaminan bahwa Tiongkok akan mengembangkan nuklir sebagai persenjataan militer berteknologi tinggi, hal ini turut didukung dengan *lack of transparency* Tiongkok atas perkembangan nuklir yang

dimiliki (Pan, 2018). Hal ini tentu menjadi tantangan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga ASEAN sebagai kawasan bebas nuklir. Kebijakan Australia bergabung dalam pakta keamanan AUKUS di tahun 2021 menjadi momentum bagi ASEAN untuk menjaga stabilitas kawasan dari kepemilikan nuklir.

Sejak tahun 1970, ASEAN telah mengembangkan kawasan bebas nuklir melalui pembentukan traktat seperti ASEAN *Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) yang berisi kesepakatan larangan bagi semua negara anggota ASEAN untuk mengembangkan, memproduksi, menguasai, membeli, melakukan uji coba senjata nuklir di dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara dan secara resmi pada tahun 1975 ASEAN menjadi kawasan bebas nuklir. Kepemilikan nuklir oleh negara-negara mitra dan tetangga seperti Pakistan, India dan Tiongkok serta Australia menjadi tantangan bagi ASEAN untuk tetap menjaga sentralitas sebagai kawasan bebas nuklir. Perbedaan sikap diantara negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Singapura dan Vietnam yang mendukung dan Indonesia, Malaysia yang menentang keterlibatan Australia dalam pakta kerjasama AUKUS menjadi tantangan bagi ASEAN *Centrality*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon negara-negara anggota ASEAN atas keterlibatan Australia di AUKUS.

Tinjauan Literatur

Pada studi hubungan internasional terminologi kepentingan nasional merupakan suatu tujuan dan ambisi negara dalam berbagai aspek seperti ekonomi, militer dan budaya. Kepentingan nasional memiliki keterkaitan erat dengan aktualisasi kekuatan yang dimiliki negara untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pemaknaan klasik, penggunaan kekuatan dalam konteks mencapai kepentingan nasional umumnya berkolerasi dengan orientasi yang bersifat destruktif atau militer sentris (*hard power*), namun penggunaan kekuatan yang bersifat destruktif ini mulai bergeser dengan kepentingan nasional yang bersifat kooperatif dan persuasif (*soft power*) (Nye, 1990). Kepentingan nasional dapat dikaji dari berbagai perspektif hubungan internasional, salah satunya dari perspektif realisme.

Teori realisme adalah kerangka teoritis yang cukup dominan dalam diskursus dan kajian studi hubungan internasional. Secara virtual, realisme membentuk kerangka pemikiran seputar kebijakan luar negeri secara

professional. Secara sederhana hal ini dimaknai bahwa realisme menempatkan posisi perilaku politik luar negeri dalam koridor realitas yang bersifat realpolitik dan bertentangan dengan kerangka idealism politik maupun liberal institusionalisme (Asrudin, 2017). Pemikiran realis Morgenthau meyakini bahwa negara sama seperti manusia yakni selalu memiliki hasrat untuk mendominasi lainnya dan karena hal tersebut akan menimbulkan perang dan konflik. Pasca berakhirnya era kolonialisme, perang dingin dan munculnya peristiwa 9/11 menjadi titik balik bagi hubungan internasional dimana proliferasi aktor dan diskursus HI mengalami pergeseran pemaknaan kepentingan nasional yang dalam implementasinya melibatkan *soft power* (Bainus dan Rachman, 2018).

Hans J Morgenthau dalam Pham (2016) menyebutkan konsep kepentingan nasional (*national interest*) jika didefinisikan dalam istilah “power” berada diantara nalar, akal atau “reason” untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta. Secara sederhana, *power* adalah instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional memiliki indikasi dimana negara sebagai aktor utama berupaya mengejar kepentingan nasionalnya. Adapun kepentingan nasional dibagi dalam beberapa klasifikasi yaitu, pertama, *Primary Interest*, kepentingan negara untuk melindungi wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa dari berbagai ancaman. Kedua, *Secondary Interest* yaitu kepentingan negara untuk memberikan kontribusi. Ketiga, *Permanent Interest* yaitu kepentingan yang bersifat konstan. Keempat, *Variable interest* yaitu kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu. Kelima, *General Interest* yaitu kepentingan yang diberlakukan oleh berbagai negara dalam beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan. Keenam, *Specific Interest* yaitu kepentingan yang bersifat spesifik atas isu tertentu.

Klasifikasi kepentingan nasional terbagi dalam empat tingkat intensitas kepentingan nasional yaitu pertama, *survival* dimana kepentingan nasional suatu negara untuk mengusahakan perlindungan wilayah serta keamanan warga negara dari berbagai ancaman yang datang dari negara lain. Kedua, selain keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, suatu negara juga memiliki kepentingan nasional untuk mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat (*Economic of Wellbeing*),

kepentingan nasional ini yang disebut vital dimana negara memiliki kepentingan untuk mensejahterahkan masyarakat dari sisi ekonomi. Ketiga, kepentingan nasional pada tingkat *major* adalah kepentingan negara untuk terlibat dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Keempat, kepentingan nasional pada tingkat periperal adalah kepentingan negara untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, kemerdekaan dan perdamaian dunia (Pham, 2016). Berdasarkan tingkatan ini, penelitian ini akan melihat urgensi sikap negara-negara anggota ASEAN dalam merespon keterlibatan Australia pada aliansi kerjasama AUKUS untuk mengukur tingkatan kepentingan nasional masing-masing negara dan pengaruhnya terhadap sikap yang ditampilkan.

Setelah melihat kepentingan negara, perlu dipahami bahwa setiap negara juga membutuhkan interaksi dengan negara lain demi mencapai kepentingan nasional tersebut karena tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maka perlu dilakukan kerjasama, baik yang bersifat bilateral maupun kerjasama multilateral di suatu kawasan tertentu. Pembentukan institusi internasional di kawasan atau regionalism merupakan perwujudan dari kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara. Menurut kaum realis, kerjasama adalah “jalan keluar” dari permasalahan ekonomi dan politik negara-negara yang berada dalam satu kawasan (Pryor, 2013). Untuk itu, menurut perspektif realis kerjasama regional dan pembangunan institusi di level kawasan hanya upaya dari negara untuk melakukan kontrol atas situasi maupun tantangan yang dihadapi oleh kawasan, maka dari itu kerjasama regional ini tidak mengarah pada integrasi politik maupun *single superstate*.

Kajian mengenai pakta keamanan AUKUS dan sentralitas ASEAN belum banyak disentuh oleh para peneliti hubungan internasional. Beberapa penelitian yang telah dilakukan fokus pada dampak dari pakta keamanan AUKUS bagi keamanan regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perbedaan sikap negara-negara ASEAN dalam merespon pakta keamanan merupakan ejawantah dari neorealisme yang berlaku di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terbagi dalam dua kubu, negara yang kontra dengan AUKUS seperti Indonesia dan Malaysia, kemudian negara yang pro AUKUS seperti Singapura, Filipina dan Vietnam. Dalam kajian berjudul *Southeast Asia's Geopolitical Dynamics Responding to*

The Emergence of AUKUS, berbagai respon yang ditunjukkan oleh negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa regionalisme ASEAN tidak kompak dalam menentukan posisi kawasan ditengah situasi regional yang berubah (Muntasyir dan Santoso, 2022).

Secara geografis ASEAN cenderung lebih dekat dengan Australia, yang merupakan salah satu negara anggota AUKUS, namun hal ini juga tidak mendorong ASEAN untuk secara penuh menyatakan dukungan atas AUKUS. Kedekatan relasi ekonomi, politik dan keamanan dengan Tiongkok juga menjadi faktor yang mendorong perbedaan sikap ASEAN dalam merespon pakta keamanan AUKUS. Perbedaan sikap negara-negara ASEAN ini dapat mengancam kestabilan keamanan kawasan Asia Tenggara (Tawakal, 2022). Hal ini dipicu oleh latarbelakang dari pembentukan AUKUS. Pakta keamanan AUKUS yang merupakan respons Amerika Serikat dari adanya berbagai kebijakan Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik dapat memacu kemungkinan konflik tradisional antara dua negara tersebut dan hal ini akan memiliki dampak luas bagi Asia Tenggara pada khususnya (Delanova, 2021). Maka dari itu, kesepakatan sikap dan posisi dari ASEAN dapat menjadi *bandwagon* atau penyeimbang rivalitas dari AS (AUKUS) dan Tiongkok.

Menurut Jose (2022) mengungkapkan bahwa AUKUS merupakan minilateralisme Amerika Serikat ditengah relasi bilateral dengan ASEAN terjalin, hal ini sejatinya dapat dimanfaatkan oleh ASEAN untuk memainkan peran di kawasan namun fenomena minilateralisme seperti AUKUS justru mengancam sentralitas ASEAN sebagai regional. Selaras dengan hal tersebut, menurut Wende (2022) menyatakan bahwa kehadiran AUKUS sebagai aliansi pertahanan sejatinya dibentuk untuk membendung kekuatan dan pengaruh Tiongkok di Kawasan Asia Pasifik namun proyeksi kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia yang menjadi titik ancaman bagi kawasan Asia Tenggara.

Tak jauh berbeda, Ha (2022) menyebutkan AUKUS sebagai minilateralisme Amerika Serikat di Kawasan Indo-Pasifik menimbulkan tantangan institusional untuk ASEAN, yang terlihat dari pertama, AUKUS menandakan penguatan keseimbangan kekuatan Amerika Serikat dan negara mitra Indo-Pasifik, sehingga berdampak pada menurunnya ketergantungan AS pada pengaruh normatif ASEAN. Kedua, AUKUS diprediksi

memberikan prospek lebih baik daripada ASEAN dalam merespon tantangan keamanan regional. Ketiga, AUKUS menunjukkan inkohistensi strategis pada tubuh ASEAN dalam menghadapi persaingan kekuatan besar. Menurut Ha (2022), ASEAN sebagai pemain sentral dikawasan Asia Tenggara, perlu menunjukkan sikap yang bulat dalam merespon AUKUS karena dapat berdampak pada posisi ASEAN sebagai institusi menjadi terancam dengan minilateralisme Amerika Serikat.

Menurut Cheng (2022), AUKUS menempatkan ASEAN dalam tiga posisi yaitu, pertama, *Security Dilemma*, pada satu sisi kapal selam bertenaga nuklir yang akan dimiliki oleh Australia atas kesepakatannya di AUKUS dapat menimbulkan babak baru perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik namun kapal selam bertenaga nuklir memiliki keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk pertahanan kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menurut Cheng (2022) akan menyebabkan ASEAN *will face a neighbour who is approaching with rapidly rising military power*. AUKUS akan menguji prinsip *Great Power Balance* ASEAN. Integrasi politik dan keamanan ASEAN yang masih rendah mendorong negara-negara ASEAN untuk menggunakan pertahanan kolektif dengan pembangunan kapasitas militer yang independen dan bersifat netral. Kehadiran AUKUS berpotensi menyebabkan negara anggota ASEAN berpihak pada satu sisi, antara AUKUS ataupun China. Kedua, AUKUS berpotensi meningkatkan persaingan negara-negara besar di kawasan. Hal ini membuat potensi resiko perlombaan senjata dan konfrontasi kekuatan besar serta mengancam stabilitas Kawasan. Ketiga, AUKUS mengancam upaya ASEAN atas kawasan bebas nuklir. Pada titik ini, sentralitas ASEAN sebagai regionalisme kawasan Asia Tenggara akan diuji.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis dokumen atau studi Pustaka. Penelitian bercorak kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat postpositivisme dengan ciri kondisi obyek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini menggabungkan analisis dari data sekunder. Adapun data didapatkan dari dokumen resmi seperti *ASEAN Political-Security Community*

(*APSC*) *Blueprint*, berita mengenai AUKUS dan *ASEAN Charter*. Selain itu, data juga diperoleh dari kajian-kajian literatur yang ada dan memiliki kontribusi terhadap penelitian ini misal buku, artikel, dokumen, surat kabar yang kemudian diolah dengan metode triangulasi untuk mendapatkan data analisis yang mendukung penelitian ini.

HASIL

Paradoks ASEAN sebagai Kawasan Bebas Nuklir

Sejak tahun 1970-an ASEAN sebagai regionalisme baru didunia mengupayakan pembentukan proposal ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*) yakni kesepakatan untuk menjaga kawasan bebas dari intervensi pihak asing dan memperluas kerjasama negara-negara ASEAN, kesepakatan ini yang kemudian menjadi embrio dari Traktat SEANWFZ (*Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*). Sejatinya SEANWFZ atau *Treaty of Bangkok* merupakan gagasan yang terbentuk dari Deklarasi ASEAN atas *ASEAN Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN) yang ditandatangani oleh lima negara pendiri pada tahun 1971 di Bangkok. Perjanjian SEANWFZ dibentuk untuk menetralsir situasi perang dingin dimana terjadi perkembangan senjata antara blok barat dan blok timur, salah satu senjata yang dikembangkan adalah senjata pemusnah massal nuklir.

Perjanjian SEANWFZ juga merupakan ejawantah kontribusi ASEAN dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui perdamaian kawasan yang sejalan dengan prinsip awal pembentukan ASEAN seperti yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Langkah ASEAN membentuk Perjanjian SEANWFZ menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan kelima yang mendeklarasikan diri zona bebas senjata nuklir. Melalui SEANWFZ, negara anggota ASEAN memiliki kewajiban sebagai berikut, 1) Dilarang mengembangkan, memproduksi, memperoleh atau memiliki kontrol terhadap senjata nuklir, 2) Dilarang memiliki pangkalan senjata nuklir, menguji atau menggunakan senjata nuklir dimanapun, 3) Dilarang membantu, mendukung, membuat, menghasilkan atau mendapat setiap perlengkapan peledak nuklir dari negara manapun, 4) Dilarang menyediakan sumber daya material atau perlengkapan senjata nuklir kepada setiap negara bebas senjata nuklir (*Non Nuclear Weapon State*), 5) Mencegah wilayah

negara anggota menempatkan perlengkapan peledak nuklir dan mencegah pengujian senjata nuklir, 6) Tidak membuang sampah radioaktif di laut yang termasuk dalam zona perjanjian.

Akan tetapi, dalam perjalanannya Perjanjian SEANWFZ mengalami hambatan yakni penundaan penandatanganan dan ratifikasi dengan lima negara pengembang nuklir yaitu Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Sejak SEANWFZ berlaku di tahun 1997, negara-negara Asia Tenggara telah mengupayakan pendekatan *soft diplomacy* kepada kelima negara pengembang nuklir namun tidak mencapai kesepakatan, hingga 10 Juli 2012 kelima negara pengembang nuklir menyatakan ketidaksiapan untuk menandatangani Protokol SEANWFZ dan hal ini ditindaklanjuti dalam KTT ASEAN ke-21 dimana ASEAN menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama dalam mewujudkan keamanan regional. Untuk itu, sejak tahun 2013-2016 ASEAN menjalankan rencana kerja yang sudah disepakati dalam *Plan of Action SEANWFZ* yang salah satunya memuat tentang komitmen negara untuk mendorong kelima negara pemilik dan pengembang nuklir.

Sejatinya Tiongkok telah menyatakan kesediaannya untuk meratifikasi SEANWFZ namun pertimbangan atas cakupan geografik menjadi hambatan dari realisasi keputusan Tiongkok tersebut (Zhou, 2020). Tak jauh berbeda, Amerika Serikat juga menunjukkan kesediaannya untuk menyepakati SEANWFZ, namun menurut AS cakupan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang menjadi batasan wilayah kawasan bebas nuklir ASEAN berpotensi menyebabkan tumpang tindih dengan konflik Laut Cina Selatan. Penolakan secara langsung ditunjukkan oleh Rusia, Inggris, Perancis yang dilatarbelakangi oleh tiga hal yaitu, 1) Ketiga negara ini berpedoman pada Pasal 51 Piagam PBB yang mengizinkan kepemilikan senjata nuklir untuk kepentingan membela diri, 2) Tidak terdapat jaminan secara pasti bahwa negara anggota ASEAN tidak akan membuat senjata pemusnah massal seperti senjata kimia dan biologi yang memiliki dampak besar bagi keamanan, lingkungan dan kestabilan sosial, 3) SEANWFZ masih terdapat ambiguitas khususnya pada cakupan batas wilayah kawasan bebas nuklir yang meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Kuswardini, 2018). Pada perjanjian, dalam artikel 1 (b) teks protokol SEANWFZ menyebutkan: "*territory*" means the land territory, internal waters, territorial sea,

archipelago waters, the seabed and the sub-soil thereof and the airspace above them;"

Ayat ini kemudian dimaknai bahwa cakupan wilayah SEANWFZ adalah melibatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dalam Pasal 57 UNCLOS menyebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal laut territorial diukur, dengan demikian jarak dari cakupan SEANWFZ sangat luas. Oleh karena itu, kehadiran SEANWFZ justru menimbulkan dualitas peraturan internasional di kawasan ZEE Asia Tenggara dan berpotensi menghilangkan peraturan UNCLOS jika cakupan wilayah SEANWFZ diterapkan.

Upaya ASEAN untuk mendorong negara-negara pemilik dan pengembang nuklir untuk menyepakati SEANWFZ sekalipun terdapat ambiguitas atas cakupan wilayah geografik peraturan berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara anggota dan ASEAN sebagai regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Brunei Darussalam, Kamboja, Laos dan Singapura termasuk dalam negara yang tidak meratifikasi *Convention of Disarmament* yakni perjanjian pelucutan senjata yang memuat poin-poin kesepakatan pengendalian dan pembatasan penggunaan senjata seperti penghentian perlombaan senjata nuklir dan pembatasan penggunaan senjata nuklir dan pencegahan perang nuklir termasuk semua hal yang terkait. Perjanjian ini menjadi landasan penting bagi negara untuk menyepakati dan mewujudkan kawasan bebas nuklir. Myanmar pun turut absen dalam perjanjian internasional *Biological and Chemical Weapons Convention* dimana perjanjian ini melarang untuk mengembangkan, memproduksi dan mengumpulkan senjata biologi dan toxin serta sepakat untuk pelucutan dengan menghancurkan senjata kimia hingga ke fasilitas yang memproduksi senjata kimia yang berada pada teritori suatu negara.

Hal ini menjadi anomali dimana ASEAN sedang gencar mendorong kerangka kawasan zona bebas nuklir SEANWFZ namun masih terdapat negara-negara anggota yang tidak menyepakati perjanjian dasar dari pelarangan penggunaan senjata nuklir dan sejenisnya. Menurut Anwar (2018), isu proliferasi nuklir telah mendorong negara-negara di dunia untuk membangun suatu mekanisme pengendalian melalui rezim maupun perjanjian keamanan dan ASEAN sebagai kawasan yang rentan terhadap efek senjata nuklir mendeklarasikan Perjanjian Kawasan Zona Bebas Nuklir SEANWFZ.

Pengalaman dunia pasca perang dingin menjadi penguat negara-negara ASEAN lainnya untuk menyepakati, akan tetapi konstruksi identitas dan keprihatinan atas pengalaman pasca perang dingin tidak berarti konsistensi yang dimiliki masing-masing negara akan menunjukkan hal yang sama. Unsur kepemimpinan di ASEAN sejatinya memiliki peranan penting dalam mendorong realisasi SEANWFZ, terlebih dengan kehadiran negara-negara besar di ASEAN menjadikan “gagasan” SEANWFZ stagnan.

Relasi ASEAN-Australia : Prospek Relasi Keduanya Pasca Ratifikasi AUKUS

Posisi ASEAN yang berada di sentral kawasan Asia Tenggara memiliki keuntungan politis, salah satunya adalah bermitra dengan Australia. Menilik dari akar sejarah, budaya, politik dan ekonomi Australia tidak memiliki kesamaan dengan negara-negara ASEAN namun keduanya sepakat untuk menjalin relasi bilateral. Hubungan ASEAN dengan Australia diawali pada tahun 1974 dan puncaknya pada tahun 2014 ASEAN-Australia berhasil menyepakati *Plan of Action (PoA)* pada KTT Peringatan 40 Tahun Kerjasama ASEAN-Australia yang menyepakati beberapa poin kerjasama antara lain, East Asia Summit (EAS), ASEAN *Post Ministerial Conference with Australia (PMC+1)*, ASEAN *Regional Forum (ARF)*, ASEAN *Defence Minister's Meeting Plus (ADMM-Plus)*, ASEAN-Australia Forum dan ASEAN *Defence Joint Cooperation Committee*. Dari sekian sektor kerjasama, sektor keamanan menjadi salah satu poin penting dari relasi ASEAN-Australia khususnya pada isu terorisme.

Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah potensial mendapatkan ancaman terorisme, hal ini disebabkan banyaknya kelompok Islam Radikal seperti Jemaah Islamiyah (JI) di Indonesia, *Moro Islamic Liberation Front (MILF)*, *Abu Sayyaf Group (ASG)* dan *Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF)* di Filipina (Chandran, 2018). Titik awal terorisme di ASEAN ditandai dengan peristiwa Bom Bali I dan II kemudian bom di Hotel JW Marriot Jakarta. Peristiwa ini kemudian menyebar ke negara-negara ASEAN lainnya seperti Filipina (Pengeboman di Kota Davao), Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut mendapatkan aliran dana dari mancanegara, salah satunya Australia.

Menurut Welle (2018), Australia adalah negara paling banyak memberikan aliran dana kepada teroris di ASEAN khususnya Indonesia dan berpotensi untuk menyebarkan paham radikal dengan cara pernikahan. Situasi ini kemudian memacu ASEAN dan Australia beraliansi dalam melawan terorisme, ditandai dengan penandatanganan kesepakatan MOU pada KTT Istimewa ASEAN-Australia pada tahun 2018 (Fredayani et al, 2019). Isu terorisme yang mendominasi merupakan *changing response* kerjasama keamanan antara ASEAN-Australia, hal ini tentu berbeda jika dikaitkan dengan isu nuklir. Keputusan Australia bergabung dalam pakta pertahanan AUKUS menjadi sorotan karena dengan AUKUS Australia memiliki akses untuk membangun, mengembangkan dan mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir, hal ini yang kemudian menjadi poin utama perdebatan keterlibatan Australia dalam AUKUS oleh ASEAN.

Praktik proyek kapal selam bertenaga nuklir sudah terjadi di beberapa negara, berdasarkan data *International Institute for Strategic Studies* pada 2021 terdapat enam negara yang tercatat memiliki kapal selam bertenaga nuklir yaitu Amerika Serikat, Rusia, Republik Rakyat Tiongkok, Perancis, India dan Inggris, serta Australia tercatat menjadi calon negara ketujuh. Hasil dan pembahasan dapat menampilkan data-data berupa tabel maupun gambar. Hasil harus didukung oleh referensi terkait ataupun dapat membandingkan dengan penelitian sebelumnya.



Sumber : International Institute for Strategic Studies, 2021

Gambar 1
Negara dengan Kepemilikan Kapal Selam Bertenaga Nuklir per 2021

Sejatinya kapal selam merupakan komponen alutista yang dimiliki oleh suatu negara, terdapat dua sistem kerja kapal selam yang populer yakni kapal selam konvensional

(diesel-elektrik) dan kapal selam nuklir. Jika kapal selam konvensional energi di pasok dari listrik, kapal selam nuklir energi didapatkan dari transfer uranium atau bahan baku nuklir. Menurut Woodhead (2019), resiko terbesar dari kapal selam bertenaga nuklir adalah kemampuan untuk meluncurkan senjata nuklir. Selain itu, kapal selam nuklir memiliki tiga resiko atas kelestarian alam antara lain: 1) *Loss of Coolant Accident* (LOCA) akibat minimnya perawatan dapat menyebabkan pemanasan berlebihan sehingga reaktor tidak berfungsi sehingga potensi kebocoran radiasi dapat terjadi; 2) Berkaitan dengan potensi meluncurkan senjata nuklir, kapal selam nuklir yang memiliki kapasitas untuk mengangkut torpedo, roket dan rudal balistik dapat menyebarkan kontaminasi radioaktif dilaut; 3) Resiko alamiah seperti tsunami. Dengan resiko lingkungan dan stabilitas keamanan di kawasan tersebut nyatanya tidak membuat Australia membatalkan rencana pembangunan 8 (delapan) kapal selam nuklir dibawah pakta AUKUS tersebut.

Dalam *white paper* pertahanan Australia sepanjang tahun 2010-an menunjukkan “kecemasan” atas kondisi keamanan di Indo-Pasifik, posisi Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan Australia juga semakin memudar (Australia Department of Defence, 2020). Selanjutnya keputusan Australia untuk bergabung dalam pakta keamanan AUKUS bersama Inggris dan Amerika Serikat dilihat sebagai satu solusi atas “kecemasan” negara tersebut. Kapal selam nuklir memberikan kesempatan Australia untuk patroli lebih lama dan meningkatkan posisi Canberra di kawasan. Menurut Chang (2021), Australia secara geografis memang tidak diuntungkan dalam peta konteslasi Indo-Pasifik maupun ASEAN, maka dari itu kapal selam nuklir tidak berpotensi membuat Australia mendapatkan dan memproduksi senjata nuklir namun merupakan bentuk *political and economic independence* Australia atas posisinya di kawasan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penarik Vietnam dan Filipina atas pernyataannya mendukung keputusan Australia dalam pakta keamanan AUKUS.

Keputusan Vietnam dalam mendukung Australia AUKUS dilatarbelakangi oleh kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan wilayah. Seperti yang diketahui, Tiongkok melakukan Tindakan agresif berupa pemasangan fasilitas militer dan penggelaran asset militer di Laut Cina Selatan di tahun 2018. Pada tahun

2022, Tiongkok telah memperkuat basis militer di Kepulauan Sparty dengan rudal anti-kala dan anti-pesawat, peralatan laser hingga jet tempur. Untuk merespon tindakan tersebut, pilihan Vietnam adalah memperkuat relasi dengan negara mitra seperti Jepang, India, Amerika Serikat dan Australia (Fook & Hop, 2018). Secara historis, negara sekutu Australia di AUKUS yakni Amerika Serikat memiliki peran penting dalam mendukung pertahanan wilayah Vietnam, Amerika Serikat mengirimkan 6 kapal patroli ke penjaga pantai Vietnam sejak tahun 2018. Tindakan ini dapat dibaca sebagai strategi *distribution of power* Vietnam. Pemerintah Vietnam sadar bahwa merangkul Amerika Serikat adalah tindakan tepat untuk mengurangi tensi Tiongkok pada konflik Laut Cina Selatan, bagi Tiongkok perang dengan Amerika Serikat sama saja dengan konflik dengan mitra dagang ekonomi dan energi utamanya (Workman, 2020). Sehingga tindakan Vietnam untuk mendekati ke Amerika Serikat, serta negara-negara sekutunya termasuk Australia di AUKUS, adalah bentuk menjaga kedaulatan dan meminimalisir potensi konflik terbuka di Laut Cina Selatan.

Selaras dengan Vietnam, Filipina adalah salah satu negara yang berkonflik dan memperebutkan wilayah di Laut Cina Selatan. Filipina telah menempuh jalur Mahkamah Internasional atas klaim wilayah perairan oleh Tiongkok dan keputusan memenangkan Filipina atas sengketa tersebut sejak 2016, namun Tiongkok tetap tidak mengakui keputusan tersebut dan tetap menjalankan aktivitas militernya di perairan Filipina. Pada 2021, Pemerintah Filipina melalui Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin Jr mengajukan protes diplomatik terhadap Beijing atas kedatangan 100 kapal Tiongkok di perairan Manila. Presiden Filipina terpilih, Ferdinand Marcos Jr menyatakan akan menegakkan keputusan Mahkamah Internasional tersebut. Kapasitas militer dan diplomatic Filipina yang tidak mencukupi, mendorong Filipina bekerjasama dengan negara mitra strategis terdekat yaitu Australia.

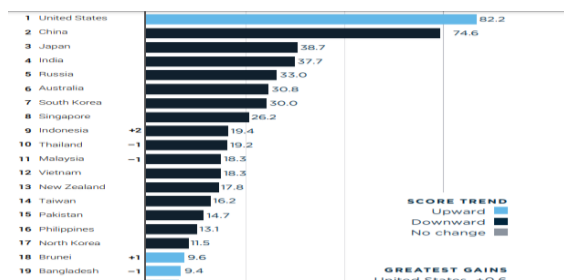
Berbeda dengan Vietnam yang memilih mendukung Australia di AUKUS karena merupakan negara mitra strategis Amerika Serikat, Filipina mendukung Australia di AUKUS karena sejarah panjang relasi kedua negara, didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi keamanan dua negara seperti isu terorisme dan keamanan maritim di Laut

Filipina Barat. Sejak 2015, Angkatan Laut Filipina dan Angkatan Laut Australia menandatangani *Terms of Reference for Navy-to-Navy Strategy Talks*. Selain itu, Australia juga mendukung Filipina secara aktif dalam Keputusan Pengadilan Arbitrase atas pengajuan klaim ekspansif Tiongkok atas Laut Cina Selatan dan hal ini yang kemudian memperat relasi kedua negara dalam sektor keamanan. Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin menyebutkan 3 alasan Filipina mendukung Australia di AUKUS yaitu: 1) Kekosongan kekuatan di Asia Tenggara akibat dominasi Tiongkok di kawasan; 2) ASEAN tidak memiliki kapasitas militer untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan; dan 3) Kapal Selam Bertenaga Nuklir yang akan dimiliki Australia akan memungkinkan Angkatan Laut merespon secara cepat dan tepat serta diprediksi dapat menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara (Castro, 2021). Merujuk Data Lowy Institute Asia Power Index 2021 menunjukkan Australia menempati posisi negara ke 8 dengan kapasitas militer terbaik di dunia atau ke 4 di kawasan Asia Pasifik, selain itu kedekatan geografis dengan Australia menjadi faktor yang mendorong Filipina mendukung Australia di AUKUS.



Sumber: Lowy Institute Asia Power Index Key Findings (2021)

Gambar 2
Ilustrasi Latar Belakang Keputusan Filipina mendukung Australia di AUKUS Berdasarkan Kedekatan Geografis



Sumber: Lowy Institute Asia Power Index Key Findings (2021)

Gambar 3
Komparasi Kapasitas Militer Asia Tahun 2021

Berbeda dengan Vietnam dan Filipina yang secara terbuka menyatakan dukungan atas Australia di AUKUS, Indonesia memilih sikap menolak keputusan Australia tersebut. Dalam perumusan kebijakan luar negeri, Indonesia memperhatikan aspek etis seperti perdamaian, demokrasi, kemanusiaan, hak asasi manusia, kesetaraan dan solidaritas, nilai ini menjadi pijakan utama Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional (Rosyidin, 2019). Nilai tersebut yang kemudian dijawantahkan sebagai “aktif” yakni aktif menjaga perdamaian dunia, hal ini juga termaktub dalam konstitusi Indonesia yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Prinsip ini secara tidak langsung memberikan Indonesia “tanggungjawab” untuk turut serta dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia hingga saat ini.

Berkaca pada prinsip tersebut, hal lain yang perlu dipahami adalah posisi Indonesia dalam ASEAN. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, kontribusi Indonesia dalam ASEAN terbilang signifikan, beberapa literatur menyebutkan Indonesia sebagai *primus inter pares* atau *the first among equals*. Hal ini dapat dimaknai bahwa sebagai negara yang berada pada posisi sentral di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki posisi tawar yang besar untuk memastikan kerangka yang diakui dan diterima oleh negara lainnya. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, kepemilikan kapal asing bertenaga nuklir yang akan ‘dimiliki’ Australia hanya akan meningkatkan tensi negara-negara besar di kawasan Pasifik. Tindakan ini juga tidak selaras dengan perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir dan hukum internasional, meskipun Australia menyebutkan kapal selam bertenaga nuklir tidak berarti Australia akan serta-merta memiliki senjata nuklir namun bagi Indonesia, hal tersebut dapat mengancam stabilitas kawasan. Pada pertemuan ke-10 Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (*Non-Proliferation Treaty*) Tahun 2022, Indonesia membawa isu kapal selam bertenaga nuklir yang tercantum dalam proposal berjudul *Nuclear Naval Propulsion* atau *Indonesian Paper*. Pertimbangan atas potensi kebocoran nuklir saat operasi, perawatan, penggunaan dan pencemaran nuklir yang membahayakan

manusia dan sumber daya laut serta potensi proliferasi senjata nuklir menjadi latarbelakang dari pengajuan proposal tersebut. Oleh karena itu, Indonesia tetap pada sikap menolak keterlibatan Australia di AUKUS. Sikap Indonesia juga dapat dimaknai sebagai *responsibility as a big brother*.

Malaysia juga memiliki pendapat yang sama dengan Indonesia, kapal selam bertenaga nuklir akan menjadi katalisator perlombaan senjata nuklir di kawasan Indo-Pasifik. Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob menyampaikan komitmen Malaysia untuk kawasan Asia Tenggara sebagai Zona Damai, Kebebasan dan Netralitas (ZOPDAN) dan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANFWZ). Keterlibatan Australia di AUKUS yang ditujukan untuk meminimalisir kekuatan Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan nyatanya tidak menarik Malaysia untuk mendukung pakta tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia yang menyebutkan “*We want to maintain the South Tiongkok Sea in particular and the region as a whole as a region of peace, of commerce, of prosperity*” (The Guardian, 2022).

Perbedaan respon dan sikap negara-negara ASEAN menjadi dilema bagi Australia. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Australia, ASEAN menempati posisi ke-3 kawasan mitra dagang terbesar bernilai \$123,7 Triliun dengan persentase 13.9% sepanjang 2018-2019. Hal ini menandakan bahwa ASEAN merupakan mitra strategis Australia, khususnya dari sisi ekonomi (DFAT, 2020)

Tabel 2
Kawasan Mitra Ekonomi Strategis Australia 2018-2019

Kawasan	Nilai Perdagangan Bilateral	
	\$ Triliun	%
Tiongkok	235,0	26,4
Uni Eropa	127,5	14,3
ASEAN	123,7	13,9
Amerika	98,7	11,1
Asia	97,4	10,9

Sumber : Department of Foreign Affairs and Trade, 2020

Akan tetapi, secara relatif Australia tidak terletak di wilayah strategis, maka dari itu Australia hanya dapat memanfaatkan pintu gerbang utama yakni ASEAN (Rumley, 2001). Secara teknis, posisi ASEAN merupakan jalur utama perdagangan dan transportasi menuju dan

dari Australia. Menurut Frost (1983), sejatinya Australia memang membutuhkan ASEAN karena ASEAN merupakan benteng geografis pertahanan Australia. Sedangkan secara ekonomi, Australia bergantung pada ASEAN dengan keberadaan *shipping hub* di beberapa negara Asia Tenggara, dengan ini Australia dapat memangkas biaya pengiriman dari negara lain tanpa harus melakukan perjanjian bilateral dengan negara-negara ASEAN. Hal ini menunjukkan secara politik-ekonomi ASEAN-Australia bersifat relativistic, sedangkan dari sisi geopolitik relasi keduanya dapat dimaknai sebagai hubungan deterministik dimana keduanya diharuskan membentuk kerjasama karena keterikatan wilayah geografis yang berdekatan dan saling mengunci. Oleh karena itu, keputusan Australia menyepakati pakta keamanan trilateral AUKUS dapat mempengaruhi prospek relasi keduanya, khususnya dimensi politik-ekonomi.

Keterlibatan Australia dalam Pakta Pertahanan AUKUS : Pengujian atas Eksistensi Sentralitas ASEAN

Perbedaan sikap dan respon negara-negara anggota AUKUS atas keterlibatan Australia dalam Pakta Pertahanan AUKUS sejatinya ujian bagi eksistensi sentralitas ASEAN. Sejak ASEAN didirikan tahun 1967, ASEAN terus berkembang untuk menjadi satu bentuk regionalisme utama di kawasan Asia Tenggara, situasi global yang dinamis serta persaingan negara-negara besar menuntut ASEAN mempertahankan posisinya sebagai kawasan netral dan sentral di kawasan. Beberapa peneliti menafsirkan sentralitas ASEAN dengan pengertian yang berbeda-beda, namun secara sederhana sentralitas ASEAN adalah peran sentral ASEAN di kawasan, hal ini berarti ASEAN dapat menentukan kebijakan dan sikapnya sendiri atas suatu situasi keamanan global yang mengancam kawasan (Anthony, 2022; Natalegawa, 2018). Dengan kata lain, ASEAN menjadi relevan secara regional bahkan global.

Akan tetapi, hal demikian sulit diwujudkan oleh ASEAN karena dua faktor, pertama tekanan kepentingan dan perilaku dari kekuatan besar di luar ASEAN dan kedua adanya perbedaan pemaknaan persepsi mengenai keamanan oleh masing-masing negara anggota ASEAN (Narine, 1998). Tantangan atas identitas kolektif dalam menyikapi keterlibatan Australia dalam pakta keamanan AUKUS ini

menunjukkan minimnya norma dan institusi yang secara formal dibentuk dalam tubuh ASEAN. Selain itu, norma ASEAN Way yang melekat kontradiktif dengan sentralitas ASEAN. Norma ASEAN Way berfungsi sebagai *code of conduct* untuk mengatur interaksi antarnegara, namun norma ini juga membatasi peran ASEAN seperti non-intervensi, maka dari itu setiap perbedaan sikap negara anggota tidak dapat diintervensi oleh negara lainnya. Oleh karena itu, perbedaan sikap atas keterlibatan Australia dalam AUKUS tidak dapat diintervensi namun tidak serta merta mengubah relevansi ASEAN di kawasan.

ASEAN dengan prinsip non-intervensinya justru memberi kesempatan kepada Australia yang mengedepankan kepentingan atas keterlibatannya di AUKUS merasa cukup nyaman untuk melakukan pembicaraan berkenaan dengan kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir. Australia sendiri melakukan pendekatan bilateral dengan negara yang menentang seperti Indonesia dan Malaysia untuk meredakan kecemasan atas keterlibatan di AUKUS (CNN, 2021). Bagi ASEAN sendiri, tindakan Australia ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan relasi dengan negara-negara anggota Asia Tenggara. Secara geografis Australia yang terisolir dari negara sekutunya, membutuhkan ASEAN sebagai *buffer zone*, alih-alih ASEAN sebagai kepentingan strategis dari kebijakan luar negeri Australia, kerjasama dengan ASEAN adalah pilihan atas kondisi geografis saja (Pramanta et al, 2018). Maka dari itu, ASEAN memang memiliki kesempatan untuk memainkan peran sebagai aktor sentral di kawasan.

Perbedaan respon negara anggota ASEAN tidak menggeser sentralitas ASEAN di kawasan, hal ini mengacu pada ASEAN Charter yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN. Pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan: “Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya”. Ayat ini secara jelas menjelaskan bahwa negara-negara ASEAN memiliki kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas serta memperkuat nilai dan norma yang berorientasi pada perdamaian di kawasan termasuk dengan tidak mendukung kebijakan persenjataan nuklir dalam bentuk apapun oleh negara intra-ASEAN maupun negara mitra. Dengan prinsip ASEAN-Way memang negara-negara anggota diberikan

kebebasan untuk menentukan kebijakan atas suatu isu tanpa intervensi negara lainnya namun solidaritas sebagai negara ASEAN tetap menjadikan ASEAN pijakan kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota.

Respon Vietnam dan Filipina atas keterlibatan Australia di AUKUS merupakan *spontaneous response* yang terbentuk karena situasi dan kondisi konflik Laut Cina Selatan yang secara langsung bersinggungan dengan teritorial mereka. Untuk itu, respon yang bertentangan dengan kebijakan ASEAN sebagai kawasan bebas nuklir tersebut sejatinya tidak menggeser ataupun mempengaruhi sentralitas ASEAN sebagai regionalisme terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan juga dengan satu sikap ASEAN dalam Sidang Komisi SEANWFZ pada Agustus 2022 lalu yang sepakat untuk mendorong dan memastikan negara-negara dengan senjata nuklir menandatangani Traktat SEANWFZ termasuk Australia.

Pada sisi lain, untuk menjaga sentralitas ASEAN tetap berjalan, dibutuhkan pemimpin negara ASEAN jika tidak ingin terjebak dalam potensi *power politics* AUKUS dikemudian hari. Pemimpin dalam hal ini bukan secara *de jure*, melainkan secara *de facto*. Satu hal yang perlu diperhatikan, persepsi dan perilaku dari pemimpin ASEAN juga sangat mempengaruhi masa depan sentralitas ASEAN (Choiruzzad, 2014). Indonesia yang akan menjadi ketua ASEAN pada 2023 memiliki kesempatan untuk menjaga dan mempertahankan sentralitas ASEAN ditengah gempuran AUKUS. Secara historis, Indonesia juga telah memiliki posisi, peran dan kontribusi secara aktif bagi perkembangan ASEAN, maka keketuaan Indonesia pada tahun 2023 nanti menjadi momentum bagi ASEAN untuk kembali menegaskan posisinya sebagai kawasan bebas senjata nuklir dalam bentuk apapun.

SIMPULAN

Keputusan Australia terlibat dalam pakta keamanan trilateral AUKUS telah menuai pro-kontra dalam tubuh ASEAN. Sebagai negara mitra dengan letak geografis yang berdekatan, berdasarkan kesepakatan AUKUS Australia berhak untuk memiliki delapan alutista kapal selam bertenaga nuklir dan hal ini yang kemudian menjadi perdebatan oleh negara ASEAN. Vietnam dan Filipina menyatakan dukungan atas kebijakan Australia tersebut, sedangkan Indonesia dan Malaysia justru

memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan respon ini didukung oleh kepentingan masing-masing negara. Vietnam dan Filipina perlu mempertahankan teritorial dari hegemoni Laut Cina Selatan sehingga melihat keberadaan kapal selam bertenaga nuklir milik Australia menjadi penyeimbang kekuatan Tiongkok di kawasan. Di sisi lain, Indonesia dan Malaysia yang memiliki tanggung jawab moral sebagai negara pendiri ASEAN, menentang kepemilikan senjata nuklir dalam bentuk apapun oleh negara ASEAN maupun negara mitra. Dengan gambaran ini, terdapat kekhawatiran akan mempengaruhi sentralitas ASEAN sebagai regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Akan tetapi, perbedaan respon ASEAN atas keterlibatan Australia dalam AUKUS tidak menggeser sentralitas ASEAN yang terlihat dalam dua hal yaitu, pertama respon Filipina dan Vietnam merupakan *spontaneous response* yang berdasarkan kondisi stabilitas keamanan negara. Selain itu, kedua negara tersebut telah menyetujui SEANWFZ dan *The Treaty of Nuclear Weapon* sehingga secara prinsip dan moral Vietnam dan Filipina akan mematuhi kesepakatan tersebut. Kedua, posisi ASEAN tetap menjadi pijakan kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota, sehingga dibutuhkan pemimpin *de facto* yang mampu mengiring dan menjaga sentralitas ASEAN tetap berjalan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan respon negara-negara ASEAN tidak mempengaruhi sentralitas ASEAN sebagai regionalisme di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Mely Caballero, 2022, *The ASEAN Way and the changing security environment: navigating challenges to informality and centrality*, *International Politic*
- Anwar, Ahmad, 2018, *Ratification of SEANWFZ: Origin of The Common Idea and Its Consistency*, *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 10(2), 13-28,
- Asrudin, A, 2017, *Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma*, *Global South Review*, 1(2), 107-122
- Australia Department of Defence, 2020, *Defence Strategic Update* (Canberra: Commonwealth of Australia, 2020), 11-17
- Australia Department of Defence, 2016, *Defence White Paper* (Canberra: Commonwealth of Australia, 2016), 39-65
- Australia Department of Defence, 2013, *Defence White Paper* (Canberra: Commonwealth of Australia, 2013), 7-21
- Australia Department of Defence, 2009, *Defending Australia in the Asia Pacific Century: Force 2030 (2009 Defence White Paper)* (Canberra: Commonwealth of Australia, 2009)
- Australian Strategic Policy Institute (ASPI), 2021, *Australia Can Count on Vietnam to Support AUKUS*, diakses melalui <https://www.aspistrategist.org.au/australia-can-count-on-vietnam-to-support-aukus/>
- Antaraneews, 2021, *Presiden Jokowi Dorong ASEAN-Australia Bangun Kepercayaan Jaga Stabilitas Kawasan*, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2484841/presiden-jokowi-dorong-asean-australia-terus-bangun-kepercayaan>
- Antaraneews, 2021, *Malaysia tegaskan prinsip poros ASEAN sikapi AUKUS*, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2456197/malaysia-tegaskan-prinsip-poros-asean-sikapi-aukus>
- Fajria, R, 2018, *Menilai Potensi Perang dibalik Kepemilikan Nuklir India dan Pakistan*, *Nation State: Journal of International Studies*, 1(1), 180-192
- Bainus, A dan Rachman, J.B, 2018, *Editorial : Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional*, *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109-110
- Bendini, R, 2016, *United States-Tiongkok Relations: A Complex Balance Between Cooperation and Confrontation*, Directorate General for External Policies Policy Department, European Union
- Boekenstein, Guy, 2021, *AUKUS and Beyond- Managing the Messaging with our Indo-Pacific Partners*, diakses melalui <https://asiasociety.org/australia/aukus-and-beyond-managing-messaging-our-indo-pacific-partners>
- Castro, Renato, 2021, *Philippines Enhances Ties With AUKUS*, diakses melalui <https://amti.csis.org/philippines-enhances-ties-with-aukus/>
- Chandran, N. 2018, *The Terror Groups on Southeast Asia's Doorstep*
- Chang, Felix K, 2021, *Strategic Choice: Australia's Nuclear-Powered Submarines*, diakses dari <https://www.fpri.org/article/2021/10/stra>

- [tegic-choice-australias-nuclear-powered-submarines/](#) -
- Cheng, M., 2022, AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications, *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1-7
- Choiruzzad, Shofwan Al-Banna, 2015, *ASEAN di Persimpangan Sejarah Politik Global, Demokrasi & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI.
- CNN, 2021, Menlu Australia Kunjungi RI Redam Kecemasan ASEAN Soal AUKUS, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211104173205-106-716724/menlu-australia-kunjungi-ri-redam-kecemasan-asean-soal-aukus>
- Delanova, Mariane Olivia, 2021, Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik, *Jurnal Dinamika Global*, 6(2), 259-285
- Departement of Foreign Affairs Republic of The Philippines, 2021, Statement of Foreign Affairs Teodoro L. Locsin, Jr on The Australian-United Kingdom-United States (AUKUS) Enhanced Trilateral Security Partnership, diakses melalui <https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisories/update/29484-statement-of-foreign-affairs-teodoro-l-locsin-jr-on-the-australia-united-kingdom-united-states-aukus-enhanced-trilateral-security-partnership>
- Deutsche Welle. 2018. Australia Terbanyak Pasok Dana Terorisme di Indonesia. Diakses dari <https://www.dw.com/id/australia-terbanyak-pasok-dana-terorisme-di-indonesia/a-19538757>.
- DFAT, 2020, *Trade and Investment at a Glance 2020*, diakses dari <https://www.dfat.gov.au/publications/trade-and-investment/trade-and-investment-glance-2020#:~:text=Tiongkok%20remained%20Australia's%20largest%20two,second%20ranked%20trading%20partner%2C%20Japan.>
- Fadry, I., 2018, Faktor-Faktor Pendorong Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Laut Cina Selatan Tahun 2011-2014 Berdasarkan Dynamic Equilibrium Doctrine.
- Fredayani, E, Jordan Aria Adibrata, Naufal Fikhri Khairi, 2019, Alasan Pembentukan Kerja Sama Keamanan ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme, *Insignia Journal of International Relations*, 6(2), 94-105
- Frost, F. 1983. *ASEAN and Australia*. Dalam: Broinowski, Alison. *Understanding ASEAN*, 144-168. London: The Macmillan Press L TD
- Frost, Harold M., 1983, *The Regional Acceleratory Phenomenon: A Review*, *Henry Ford Hospital Medical Journal*, 31(1), 3-9
- Ha, Hoang Thi, 2022, Understanding the Institutional Challenge of Indo-Pacific Minilaterals to ASEAN, *Contemporary Southeast Asia*, 44(1), 1-30
- Hanoitimes.vn, 2021, *Vietnam spells out stance on AUKUS*, diakses dari <https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aukus-318802.html>
- Jose, Hino Samuel, 2022, From Indo-Pacific Centrality to Strategic Autonomy: ASEAN-US Perspective, *Indonesian Journal of International Relations*, 6(2), 205-228
- Kuswardini, Seftina, 2018, ASEAN dalam Mendorong Negara Permanent 5 Untuk Mengaksesi Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone, *Journal of Islamic World and Politics*, 2(1), 267-281
- Liang Fook, L., & Hoang Hop, H., 2018. Vietnam's Responses to Tiongkok's Maritime Assertiveness in the South Tiongkok Sea. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2018_50
- Lowly Institute, 2021, *Lowly Institute Asia Power Index Key Findings 2021*, diakses dari <https://power.lowlyinstitute.org/downloads/lowly-institute-2021-asia-power-index-key-findings-report.pdf>
- Muntasyir, M.Badry, Made Panji Teguh Santoso, 2022, Southeast Asia's Geopolitical Dynamics in Responsive to The Emergence of AUKUS, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 2(1), 21-43,
- Narine, Shaun, 1998, ASEAN and the Management of Regional Security, *Pacific Affairs*, 71(2), 195-214

- Natalegawa, Marty, 2019, *Does ASEAN Matter? A View From Within*, Singapura: ISEAS Yusof Ishak Institute
- Nye, Joseph S, 1990, Soft Power, *Foreign Policy*, 80, 153-171
- Pan, Zhenqiang, 2018, A Study of Tiongkok's No-First-Use Policy on Nuclear Weapons, *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 1(1), 115-136,
- Pham, J Peter, 2016, What is in The National Interest ? Hans Morhenthau's Realist Vision and American Foreign Policy, *American Foreign Policy Interests*, 37(4), 187-193
- Pramanta, Rio Akbar, et al, 2018, Kemitraan Startegis Non-Zero Sum Game : Hubungan ASEAN-Australia dalam Konteks Geopolitik, *Indonesian Perspective*, 3(2), 111-126
- Pryor, J, 2013, State Preferences and Institution Evolution: From Security to Economic Interest, diakses melalui <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2308830>
- Rosyidin, M., 2019, The Dao of foreign policy: Understanding China's dual strategy in the South China Sea, *Contemporary Security Policy*, 40(2), 214-238
- Rumley, Dennis. 2001. *The Geopolitics of Australia's Regional Relations*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Tawakal, Akmal, 2022, Dinamika Keamanan Indo-Pasifik dan Uni Eropa Terkait Aliansi AUKUS, *Global Insight Journal*, 7(1), 18-32
- The Guardian, 2022, Malaysian foreign minister says concerns remain about Aukus pact after meeting with Penny Wong, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2022/jun/28/malaysian-foreign-minister-says-concerns-remain-about-aukus-pact-after-meeting-with-penny-wong>
- The Guardian, 2021, *What is the Aukus Alliance and What are its implications?*, diakses dari <https://www.theguardian.com/politics/2021/sep/16/what-is-the-aukus-alliance-and-what-are-its-implications>
- This Weekend in Asia, 2021, *Singapore hopes Aukus pact Contributes to Regional Peace and Stability Amid US-Tiongkok Rivalry*, diakses melalui [asia/politics/article/3151550/singapore-hopes-aukus-pact-contributes-regional-peace-and](https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3151550/singapore-hopes-aukus-pact-contributes-regional-peace-and)
- Treaty on The Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, 2021 diakses melalui <https://asean.org/asean2020/wp-content/uploads/2021/02/nuclear-weapon-free-zone.pdf>
- Wende, Anthony, 2022, Emergence of AUKUS Pact As A Regional Bloc and Its Implications in Asia Continent, *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1), 44-60
- Woodhead, Dylan, 2019, The Origin, Function and Impact of Nuclear Submarines, diakses dari <http://large.stanford.edu/courses/2019/p/h241/woodhead2/>
- Workman D, 2020. *Tiongkok's Top Trading Partners*. Retrieved from <http://www.worldstopexports.com/Tiongkok-top-import-partners/>
- Zhou, Laura, 2020, *Is Tiongkok Really Ready to Back a Nuclear Arms-Free Southeast Asia?*, diakses dari <https://www.scmp.com/news/Tiongkok/diplomacy/article/3114218/Tiongkok-really-ready-back-nuclear-arms-free-southeast-asia>